

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) telah berjalan dengan baik. Kesimpulan ini diperoleh berdasarkan analisis yang selaras dengan fenomena yang ditemukan, yaitu sebagai berikut:

a. Input

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Bintoro dari aspek sumber daya khususnya Sumber Daya Manusia (SDM) belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang berlaku. Hal ini terlihat dari masih adanya Pendamping Sosial PKH yang menangani lebih dari 300 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH melebihi jumlah ideal yang ditetapkan, yaitu 200-300 KPM per-pendamping. Meskipun demikian, para pendamping telah direkrut sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 10, dan telah memiliki sertifikat resmi dari Kementerian Sosial RI melalui kegiatan diklat dan bimtek. Dari sisi sarana dan prasarana pelaksanaan PKH di Kelurahan Bintoro dapat dikatakan sudah memadai. Hal ini ditunjukkan dengan tersedianya fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial yang merata, serta adanya modul

pendampingan dari Kemensos RI yang digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas Pendamping Sosial PKH terhadap KPM PKH.

b. *Process*

Proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur serta mekanisme yang tercantum dalam pedoman pelaksanaan PKH, mulai dari tahap perencanaan hingga pendampingan. Namun, pada tahap validasi data khususnya saat penginputan ke dalam aplikasi e-PKH, Pendamping Sosial PKH menghadapi kendala akibat gangguan pada *server* aplikasi tersebut. Selain itu, terdapat hambatan lain yang bersumber dari dokumen kependudukan yang rusak atau hilang terutama dialami oleh masyarakat lanjut usia (lansia) yang menyebabkan keterlambatan atau kesulitan dalam proses verifikasi data.

c. *Output*

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan dampak terhadap penurunan angka kemiskinan, meskipun belum secara langsung menyelesaikan permasalahan kemiskinan secara menyeluruh. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasa terbantu terutama dalam pemenuhan kebutuhan di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pelaksanaan PKH juga turut mendorong peningkatan pendapatan keluarga karena beberapa KPM telah memanfaatkan dana bantuan sebagai modal usaha. Selanjutnya, dalam hal pemanfaatan fasilitas, KPM PKH di Kelurahan Bintoro menunjukkan peningkatan partisipasi dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial secara lebih rutin dan teratur.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Upaya mengatasi beban kerja yang berlebih pada Pendamping Sosial PKH, disarankan agar instansi terkait melakukan peninjauan ulang terhadap jumlah pendamping yang bertugas. Penambahan jumlah pendamping dapat membantu meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan pendampingan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), serta memastikan bahwa rasio pendamping dan KPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pemerintah dan pihak pelaksana perlu melakukan peningkatan dan pemeliharaan terhadap sistem aplikasi e-PKH guna menghindari gangguan teknis yang dapat menghambat proses validasi dan verifikasi data. Penguatan infrastruktur teknologi informasi menjadi penting untuk mendukung kelancaran administrasi program secara digital.
3. Disarankan agar program PKH tidak hanya fokus pada bantuan tunai, tetapi juga memperkuat aspek pemberdayaan ekonomi KPM melalui pelatihan kewirausahaan, pengelolaan keuangan keluarga, dan akses terhadap program pemberdayaan lainnya. Dengan demikian, KPM dapat lebih mandiri secara ekonomi dan perlahan keluar dari kondisi kemiskinan.
4. Diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program di lapangan, baik dari segi administrasi, pelaporan, maupun efektifitas dampaknya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa

pelaksanaan PKH berjalan sesuai tujuan dan dapat terus ditingkatkan berdasarkan temuan dan dinamika yang ada di masyarakat.